



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat 10710  
Telepon 021-3500901 Fax. 021-3441261

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance*  
Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur**

**Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur  
Tahun Anggaran 2022**

## I. Latar Belakang

Permasalahan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai merebak awal Maret 2020 berdampak bagi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi lebih rendah dari 5% dibandingkan kondisi normal 6-7%, menyebabkan kondisi perekonomian negara tertekan. Keberadaan pandemi Covid-19 menuntut semua pihak menjaga jarak fisik demi mencegah penyebaran Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi menjadi lambat. Selain itu, Covid-19 mengubah cara bekerja dan mengelola bisnis sehingga tidak hanya sektor swasta, perusahaan BUMN pun juga terdampak.

Hampir 90% BUMN dari total 142 BUMN terkena dampak pandemi Covid-19. Banyak kriteria yang menjadi penyebab banyaknya BUMN terkena dampak Covid-19, di antaranya dari sisi suplai, dikarenakan pasokan bahan baku yang terganggu dan barang-barang yang tidak terserap pasar. Sedangkan dari sisi permintaan, adanya penurunan daya beli, permintaan, dan penjualan barang dan jasa. Dari sisi operasional, terjadinya pembatasan atau penghentian operasi perusahaan. Melalui PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pemerintah berusaha membantu BUMN dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional.

BUMN Karya merupakan salah satu klaster BUMN yang mendapatkan penugasan dalam menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor infrastruktur sesuai Perpres No. 3 Tahun 2016 jo. Perpres No. 109 Tahun 2020, baik yang sudah dan sedang dibangun dalam kapasitas kontraktor maupun investor. Adapun proyek infrastruktur tersebut meliputi: jalan tol, pelabuhan, bandar udara, kereta/*High Speed Railway/Light Rail Transit* (LRT), dan bendungan. Pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur oleh BUMN Karya karena adanya penugasan khusus seperti: Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Trans Jawa, dan LRT Jabodebek serta dengan mendapatkan kontrak secara *business to business* dari anggaran pemerintah/BUMN/swasta. BUMN Karya selaku investor untuk membiayai proyek infrastruktur sebagian besar bersumber dari pinjaman dan akan mendapatkan pengembalian modalnya kembali dalam jangka panjang. Sementara BUMN Karya selaku kontraktor akan mendapatkan pembayaran berdasarkan progres proyeknya sesuai kontrak dengan pemerintah/BUMN/swasta.

Secara umum, penugasan BUMN Karya dan pandemi Covid-19 memberikan dampak pada pendapatan usaha dan laba bersih BUMN Karya yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan beban keuangan yang meningkat untuk pengembalian pinjaman pokok dan bunga. Selain itu, proyek infrastruktur yang sudah beroperasi tingkat *Internal Rate of Return* (IRR) juga terdapat ketidaksesuaian antara kajian awal dan realisasinya.

Saat ini, BUMN Karya mengalami masalah likuiditas dan keterbatasan dalam melakukan pinjaman baru untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk mendukung kapasitas usaha BUMN Karya diantaranya: (i) *asset recycling* melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi/investor; (ii) restrukturisasi utang; (iii) penambahan PMN yang berkelanjutan secara cermat; (iv) pemberian jaminan pinjaman oleh Pemerintah; dan (v) perubahan skema penugasan dimana BUMN Karya hanya sebagai kontraktor.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi dalam menyajikan penelaahan data dan informasi terkait monitoring kinerja keuangan BUMN Karya dalam pelaksanaan penugasan PSN, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja di atas, maka kami membutuhkan Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur.

## **II. Tujuan dan Sasaran**

### **A. Tujuan**

Tujuan dari pengadaan Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur antara lain: (i) melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan kinerja keuangan BUMN dalam melaksanakan proyek infrastruktur PSN; (ii) melakukan analisis dan perumusan rekomendasi terkait kinerja keuangan BUMN dalam melaksanakan proyek infrastruktur PSN; (iii) berkontribusi dalam kegiatan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya terkait kinerja keuangan BUMN dalam melaksanakan proyek infrastruktur PSN; (iv) menyusun laporan hasil pelaksanaan koordinasi terkait kinerja keuangan BUMN dalam melaksanakan proyek infrastruktur PSN; dan (v) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur.

### **B. Sasaran**

Sasaran dari pengadaan Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur adalah:

- a. Tersusunnya bahan dan telaahan untuk membantu pelaksanaan tugas Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur dalam mengkoordinasikan kebijakan di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.
- b. Tersedianya informasi dan basis data sebagai bahan penunjang dalam pelaksanaan koordinasi di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.

### C. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur adalah tersedianya bahan telaahan, informasi dan data untuk membantu pelaksanaan tugas Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur dalam mengkoordinasikan kebijakan di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.

### III. Ruang Lingkup Pekerjaan (Sasaran Kerja)

NO.	III. Uraian Tugas	Target		
		Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu	Waktu
1	Membantu pelaksanaan tugas Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur mengkoordinasikan kebijakan di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.	1 Paket Dok	100%	12 bulan
2	Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.	1 Paket Dok	100%	12 bulan
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.	1 Paket Dok	100%	12 bulan
4	Melakukan analisis terhadap berbagai input, permasalahan, potensi penyelesaian dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Utilitas dan Industri Manufaktur.	1 Paket Dok	100%	12 bulan
5	Membantu menyediakan data penunjang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan di bidang Utilitas dan Industri Manufaktur.	1 Paket Dok	100%	12 bulan
6	Membantu pelaksanaan rapat – rapat, seminar/workshop, Focus Group Discussion, serta kegiatan monitoring di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur.	1 Paket	100%	12 bulan

#### **IV. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi Administrasi dan Teknis**

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur yang bertanggung jawab secara penuh dan bekerja secara penuh waktu sesuai jam kerja yang berlaku di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

##### **A. Kualifikasi Administrasi**

Persyaratan Administrasi Tenaga Teknis Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur adalah: Ijazah, Transkrip Nilai, Daftar riwayat hidup, *fotocopy* KTP, dan *fotocopy* NPWP, dan *fotocopy* Rekening Koran Bank Pribadi

##### **B. Kualifikasi Teknis**

1. Pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi/Akuntansi/Manajemen.
2. Memiliki pengalaman dalam analisis laporan keuangan perusahaan dan *project finance*.
3. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik.
4. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
5. Memiliki motivasi kerja yang baik, aktif, dan komunikatif.
6. Memiliki NPWP sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
7. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS atau ASN.

#### **V. Durasi / Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur adalah 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

#### **VI. Pembebanan Biaya**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis *Corporate Finance* Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2022 pada kode kegiatan 4541, yaitu kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kualifikasi	Penghasilan Perbulan (Rp)	Jangka Waktu Penugasan (bulan)	Total Penghasilan (Rp)
1.	Tenaga Teknis Bidang Utilitas dan Industri Manufaktur	6.000.000	12	72.000.000

Jakarta, 1 November 2021

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur



Sunandar

NIP 19700316 199403 1 003